

Tala Terima DIPA TA 2020



<https://apahabar.com/2019/11/sukamta-terima-dipa-2020-dari-gubernur-kalsel/>

Bupati Tanah Laut (Tala), H Sukamta, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 di Gedung KH Idham Chalid, Kantor Setdaprov Kalsel, Rabu (27/11).

Dalam kegiatan itu, penyerahan DIPA 2020 dilakukan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, kepada seluruh bupati/walikota se-Kalsel. DIPA Kabupaten Tala sebesar Rp 1,3 triliun, menurut bupati, akan diteruskan ke SKPD dan instansi vertikal agar pelaksanaan anggaran 2020 segera dimulai. Terutama yang menyangkut pengadaan barang dan jasa.

Kita harapkan, para pengguna anggaran segera melaksanakan dan memproses pengadaan barang dan jasa. Sehingga per 1 Januari, kegiatan yang menggunakan APBN ini bisa segera dilaksanakan, ujanya.

Menurut bupati, jika selama ini kegiatan terlaksana pada pertengahan akhir semester satu, itu semua dikarenakan kegiatan disusun bersamaan dengan perencanaan.

Karena itu diharapkan kepada seluruh pengguna anggaran, tidak ada lagi persoalan dalam perencanaan. Sehingga 1 Januari 2020 sudah bisa dilaksanakan. Sementara gubernur dalam sambutannya menegaskan, kabupaten/kota sesegera mungkin merealisasikan kegiatan atau program yang dibiayai APBN. Meski demikian, Paman Birin, sapaan akrabnya, mengingatkan agar memperhatikan dan menjaga efektivitas serta akuntabilitas dalam penggunaan APBN.

Menurutnya, jika ada kesulitan dalam menggunakan anggaran, untuk tidak segan-segan bertanya, dan yang paling utama, untuk tidak jadi pemalas.

Sumber Berita:

1. <http://banuapost.net>, Tala Terima DIPA TA 2020, Senin, 30 Desember 2019.
2. <https://apahabar.com>, Sukamta Terima DIPA 2020 dari Gubernur Kalsel, Senin, 30 Desember 2019.

Catatan:

✿ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri empat kategori yakni:

1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran;
2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan;
3. Kepatuhan Terhadap Regulasi;
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

✿ 12 Indikator Penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
2. Penyelesaian Tagihan (bobot 20%);
3. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%);
4. Data Kontrak (bobot 10%);
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) (bobot 10%);
6. Revisi DIPA (bobot 5%);
7. Pengembalian/Kesalahan SPM (bobot 5%);
8. Retur SP2D (bobot 5%);
9. Penyampaian LPJ Bendahara (bobot 5%);
10. Renkas/ RPD Harian (bobot 5%);

11. Nilai Pagu Minus Belanja Pegawai (bobot 5%);
12. Dispensasi Pengajuan SPM (bobot 5%).

(Sumber: <https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/painan/id/berita/berita-terbaru/202-berita-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/2845-sosialisasi-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran.html>)